

## **Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Warga Penerima Manfaat di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya**

Arif<sup>1</sup>  
Elsa Novianti<sup>2</sup>  
Meycel Pratama<sup>3</sup>  
Selmai<sup>4</sup>  
Yonatan Ari Santoso<sup>5</sup>

[jararif289@gmail.com](mailto:jararif289@gmail.com)<sup>1</sup>  
[elsan5492@gmail.com](mailto:elsan5492@gmail.com)<sup>2</sup>  
[meycellpratama@gmail.com](mailto:meycellpratama@gmail.com)<sup>3</sup>  
[Selmaimye@gmail.com](mailto:Selmaimye@gmail.com)<sup>4</sup>  
[yonatan.arisantoso@fisip.upr.ac.id](mailto:yonatan.arisantoso@fisip.upr.ac.id)<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia**

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effectiveness of the Direct Cash Assistance (BLT) program for beneficiaries in Menteng Village, Jekan Raya District, Palangka Raya City. A descriptive qualitative approach was employed using observation, in-depth interviews, and documentation. The analysis focuses on targeting accuracy, data verification and validation, and the timeliness of aid distribution. The results show that the BLT program has been relatively effective in reducing the economic burden of low-income communities. The use of a decile-based data system and the involvement of neighborhood units (RT) in verification contribute to improved targeting. However, challenges such as data inconsistencies, duplicate beneficiaries, and limited evaluation remain. From a sharia perspective, the program aligns with the principles of justice ('adl) and public welfare (maslahah). Nevertheless, strengthening transparency, accountability, and data validation is necessary to ensure fair and sustainable distribution in accordance with Islamic economic principles.*

**Keywords:** *Direct Cash Assistance (BLT), Program Effectiveness, Targeting Accuracy, Data Validation, Sharia Perspective*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis difokuskan pada ketepatan sasaran, proses verifikasi dan validasi data, serta ketepatan waktu penyaluran bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BLT relatif efektif dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Penerapan sistem berbasis desil dan keterlibatan RT dalam verifikasi turut meningkatkan ketepatan sasaran. Namun, masih terdapat kendala seperti ketidaksesuaian data, penerima ganda, dan evaluasi yang belum optimal. Dalam perspektif syariah, program ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Namun demikian, diperlukan penguatan transparansi, akuntabilitas, dan validasi data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Bantuan Langsung Tunai (BLT), Efektivitas Program, Ketepatan Sasaran, Validasi Data, Perspektif Syariah

## A. PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kerentanan ekonomi masih menjadi persoalan struktural dalam pembangunan di Indonesia. Berbagai kebijakan sosial dirancang pemerintah untuk mereduksi dampak ketimpangan dan mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yaitu pemberian bantuan dalam bentuk uang tunai kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu. Secara konseptual, bantuan tunai dipandang sebagai bentuk intervensi cepat (*rapid response policy*) yang bertujuan menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga miskin di tengah tekanan ekonomi (Torado & Smith, 2011)

Dalam perspektif kebijakan publik, efektivitas program tidak hanya diukur dari tersalurkannya anggaran, tetapi sebesar apa program tersebut mampu memenuhi tujuan yang sudah menjadi target. Efektivitas mencakup ketepatan sasaran, ketepatan waktu distribusi, kecukupan jumlah bantuan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan penerima manfaat (Dunn, 2017). Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi BLT menjadi penting guna memastikan bahwa kebijakan tersebut memang memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan tidak sekadar bersifat administratif.

Keadaan terkini menunjukkan bahwa berbagai program bantuan sosial tunai telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya beli dan stabilitas

ekonomi rumah tangga miskin. (Awalia & Sumayya, 2024). Transfer langsung memungkinkan keluarga penerima mempertahankan konsumsi dasar di tengah ketidakpastian ekonomi (Wafik & Putra, 2023).

Namun demikian, efektivitas program sangat bergantung terhadap data penerima, proses verifikasi, kapasitas aparatur, serta tata kelola distribusi bantuan. Ketidaktepatan sasaran, kecemburuan sosial, dan lemahnya transparansi masih sering menjadi kendala dalam pelaksanaan bantuan sosial di tingkat lokal (Nunung et al., 2025; Kusumawati, A. S., 2019; BPS, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual program BLT memiliki potensi besar dalam mengurangi kerentanan ekonomi, implementasinya di tingkat daerah masih memerlukan evaluasi yang lebih mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini akan berfokus pada analisis empiris mengenai efektivitas pelaksanaan BLT pada tingkat kelurahan dengan mempertimbangkan aspek ketepatan sasaran, mekanisme distribusi, serta dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengkaji secara lebih spesifik dinamika implementasi program bantuan tunai pada tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan dalam praktik di tingkat lokal.

Kelurahan Menteng yang berada di wilayah Kecamatan Jekan Raya ialah wilayah dengan jumlah populasi masyarakat yang cukup besar dan kondisi sosial-ekonomi yang beragam. Keberagaman karakteristik masyarakat tersebut menjadikan wilayah ini relevan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan BLT, karena perbedaan kondisi ekonomi dan sosial dapat memengaruhi penerimaan serta dampak program untuk masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian komprehensif untuk menilai sejauh mana BLT telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, baik dari aspek ketepatan sasaran, mekanisme distribusi, maupun kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian, rumusan masalah dalam proses penelitian ini ialah bagaimana efektivitas dan implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Menteng serta terdapat indikator yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam implementasinya. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan BLT di Kelurahan Menteng dengan menilai ketepatan sasaran penerima, mekanisme distribusi bantuan, serta dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat penerima manfaat.

## **B. TEORI**

### **1. Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Kebijakan tidak hanya berbentuk peraturan tertulis, tetapi juga mencakup keputusan politik, tindakan administratif, hingga pilihan untuk tidak melakukan intervensi terhadap suatu masalah. (Dye, 2013) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan mencerminkan prioritas politik pemerintah dalam merespons tuntutan masyarakat. Sementara itu, (Dunn, 2012) memandang kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang terstruktur dan memiliki tahapan yang jelas, mulai dari perumusan agenda, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi, hingga evaluasi. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan proses dinamis yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan.

### **2. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap inilah suatu kebijakan dijalankan dan diuji efektivitasnya di lapangan. Edwards III (1980) mengemukakan empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa tujuan kebijakan dipahami secara jelas oleh pelaksana. Sumber daya mencakup anggaran, personel, dan fasilitas yang memadai. Disposisi berkaitan dengan komitmen dan sikap pelaksana terhadap kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas membantu mengurangi tumpang tindih kewenangan. Kegagalan pada salah satu faktor tersebut dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal meskipun perumusan kebijakan telah dilakukan dengan baik.

### **3. Konsep Efektivitas**

Efektivitas merupakan konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal (Siagian, 2008). (Steers, 1975) menambahkan bahwa efektivitas organisasi dapat dilihat dari tiga pendekatan, yaitu pencapaian tujuan, integrasi antar bagian organisasi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks program bantuan sosial, efektivitas dapat diukur melalui ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu penyaluran, kecukupan jumlah bantuan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan penerima.

#### **4. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu bentuk kebijakan perlindungan sosial yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat miskin atau rentan miskin. Tujuan utama BLT adalah menjaga daya beli masyarakat, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, dan mencegah peningkatan angka kemiskinan terutama pada masa krisis ekonomi atau situasi darurat. Di Indonesia, program BLT telah diterapkan dalam berbagai periode, termasuk saat krisis ekonomi dan masa pandemi COVID-19. Kebijakan ini diatur melalui berbagai regulasi pemerintah sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial nasional.

#### **5. Konsep Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, baik material, spiritual, maupun sosial, sehingga individu mampu menjalankan fungsi sosialnya secara layak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri. Dalam konteks penelitian ini, kesejahteraan sosial diukur melalui kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, stabilitas ekonomi keluarga, serta peningkatan kualitas hidup secara umum.

#### **6. Perspektif Syariah dalam Program Bantuan Sosial (BLT)**

Dalam perspektif ekonomi Islam, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dikategorikan sebagai bentuk distribusi kekayaan (redistribution of wealth) yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan instrumen dalam Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang memiliki tujuan utama (Tahqiq al-'Adalah al-Ijtima'iyah) mewujudkan keadilan sosial.

Prinsip utama yang relevan dalam implementasi BLT antara lain:

a. Keadilan ('Adl)

Bantuan harus diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak (mustahik). Ketidaktepatan sasaran dalam BLT mencerminkan ketidakadilan distribusi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

b. Amanah dan Akuntabilitas

Pengelolaan dana publik harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Islam, amanah merupakan nilai fundamental dalam pengelolaan harta publik.

c. Masalahah (Kemaslahatan Umum)

Program BLT bertujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Namun, agar masalah tercapai secara optimal, program harus bebas dari kesalahan data dan penyimpangan.

d. Larangan Gharar (ketidakjelasan)

Ketidakkuratan data penerima dan sistem yang belum optimal dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakjelasan (gharar) yang perlu diminimalisir melalui sistem validasi yang lebih kuat.

Selain itu, dalam Islam bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi (empowerment). Oleh karena itu, integrasi BLT dengan program pemberdayaan seperti pelatihan usaha atau bantuan modal sangat dianjurkan agar selaras dengan prinsip kemandirian ekonomi (al-kasb) dalam Islam.

## **7. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini menganalisis efektivitas Program BLT melalui indikator ketepatan sasaran, ketepatan waktu, kecukupan bantuan, serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Kerangka pemikiran ini menempatkan implementasi kebijakan sebagai variabel penting yang memengaruhi keberhasilan program dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Menteng, Kota Palangka Raya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam mekanisme penetapan penerima bantuan berbasis desil, proses verifikasi dan validasi data, mekanisme penyaluran bantuan, serta kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Menteng dengan pertimbangan bahwa sejak tahun 2025 kelurahan tersebut telah menggunakan sistem pendataan berbasis desil dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta aplikasi digital dalam menetapkan penerima bantuan. Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu aparat kelurahan yang berperan sebagai operator data bantuan sosial dan pihak yang terlibat dalam proses verifikasi, serta Ketua RT yang melakukan validasi data di tingkat lingkungan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap proses administrasi serta penyaluran bantuan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi kelurahan, data penerima bantuan tahun 2025, dan regulasi yang berkaitan dengan bantuan sosial.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung mekanisme pelayanan dan penyaluran bantuan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai sistem desil, peran kelurahan sebagai operator, kendala validasi data, serta kebijakan internal dalam menyikapi masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah arsip dan data administratif terkait penyaluran bantuan.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga tahap interpretasi akhir. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Penetapan Penerima BLT Berbasis Data Desil**

Penetapan penerima BLT sejauh ini dilakukan memakai pendekatan berbasis data desil yang mulai diterapkan secara lebih sistematis sejak tahun 2025. Sistem ini memanfaatkan basis data kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut kemudian disalurkan kepada pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan melalui aplikasi khusus yang memuat informasi kondisi sosial ekonomi masyarakat beserta klasifikasi tingkat kesejahteraannya.

Dalam sistem ini, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 tingkatan desil, yaitu pembagian kelompok penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi dari yang paling rendah hingga paling tinggi. Desil 1 merepresentasikan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa program bantuan sosial dapat diberikan secara lebih tepat sasaran, objektif, dan berbasis data.

Secara umum, ketentuan penerima bantuan berdasarkan desil yaitu:

1. Desil 1–4 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah sehingga secara otomatis layak dan menjadi prioritas utama penerima bantuan. Kelompok ini umumnya memperoleh program bantuan sosial seperti PKH dan BLT, serta bantuan kebutuhan pokok atau sembako.
2. Desil 5 masih termasuk kelompok rentan, namun bentuk bantuan yang diterima lebih bersifat perlindungan sosial dasar, seperti Penerima

Bantuan luran (PBI) untuk jaminan kesehatan atau program pelayanan kesehatan gratis.

3. Desil 6–10 dikategorikan sebagai kelompok keluarga sejahtera, sehingga pada umumnya tidak menjadi prioritas penerima bantuan sosial reguler.

Penggunaan sistem berbasis desil ini memberikan sejumlah keuntungan, antara lain meningkatkan akurasi penargetan bantuan, meminimalkan potensi kesalahan penerima (*inclusion error dan exclusion error*), serta memperkuat transparansi dalam proses penetapan penerima bantuan.

Dalam pelaksanaannya, proses penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap. Mekanisme penyaluran bertahap ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu distribusi, mempermudah proses administrasi, serta meminimalisir potensi kericuhan atau penumpukan penerima bantuan di lokasi penyaluran. Selain itu, penyaluran bertahap juga memungkinkan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan pemantauan secara lebih efektif terhadap penerima bantuan.

### **Proses Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Penerima Bantuan**

Proses pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Menteng mekanisme pendataan telah mengalami perubahan dimana sekerang melalui pemanfaatan sistem basis data terintegrasi. Data penerima bantuan tidak lagi sepenuhnya di data secara manual oleh aparat kelurahan, melainkan bersumber dari basis data nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial. Basis data ini menjadi landasan utama dalam menentukan dan menetapkan penerima berbagai program bantuan sosial pemerintah (Kementerian Sosial RI, 2022).

Dalam sistem masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 kategori desil berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Kelompok desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paaling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paaling tinggi, Secara umum, rumah tangga yang berada pada desil 1 hingga desil 5 menjadi prioritas penerima berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPTN), maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sistem pengelompokkan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan secara lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang paaling membutuhkan (Sulaksono et al., 2012).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2025 Kelurahan Menteng telah menggunakan sistem berbasis aplikasi dalam proses penetapan penerima bantuan. Melalui sistem ini, data masyarakat yang telah tersedia dalam basis data nasional dapat diakses oleh pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan. Dengan demikian, peran kelurahan sebagai operator data yang

bertugas mengelola serta memverifikasi data penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Digitalisasi sistem pendataan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat (Darlis et al., 2025).

Selain menggunakan basis data nasional, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan melalui berbagai platform digital, seperti aplikasi Cek Bansos maupun melalui Dinas Sosial. Mekanisme ini memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Penelitian sebelumnya, pemanfaatan aplikasi digital dalam sistem bantuan sosial dapat meningkatkan transparansi serta mempermudah proses pengawasan publik terhadap penyaluran bantuan pemerintah (Amelia & Fitrianto, 2025).

Di Kelurahan Menteng menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dalam pendataan penerima bantuan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah ketidaksesuaian antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi masyarakat di lapangan. Terdapat beberapa kasus dimana sebagian masyarakat memberikan informasi yang tidak akurat atau memalsukan data dan kondisi tempat tinggal dalam proses pengajuan bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem digital tetap memerlukan proses verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tahapan verifikasi dan validasi menjadi bagian penting dalam memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Dalam mekanisme yang diterapkan di Kelurahan Menteng, proses verifikasi dilakukan dengan melibatkan perangkat lingkungan seperti Rukun Tetangga (RT). RT memiliki peran penting dalam memastikan bahwa calon penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria sebagai masyarakat yang membutuhkan bantuan. Proses ini dilakukan melalui pengecekan data administrasi serta pengamatan langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan setempat.

Perubahan mekanisme verifikasi dan validasi ini juga menunjukkan perbedaan dengan sistem yang diterapkan sebelumnya. Pada mekanisme lama, usulan nama calon penerima bantuan berasal dari RT yang kemudian disampaikan kepada pihak kelurahan untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Namun pada mekanisme yang berlaku saat ini, data calon penerima bantuan berasal dari pemerintah pusat melalui basis data nasional, sementara RT berperan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian data tersebut di tingkat masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial merupakan langkah penting untuk memastikan ketepatan sasaran

program bantuan. Proses pemutakhiran data kemiskinan melalui DTKS diperlukan untuk meminimalisir kesalahan sasaran (inclusion error dan exclusion error) dalam program perlindungan sosial Dewi et al., (2022). Tanpa adanya verifikasi dan validasi yang kuat di tingkat lokal, program bantuan sosial berpotensi tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Hastuti et al., 2020).

### **Efektivitas dalam Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial**

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu bentuk kebijakan perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program ini dirancang sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mengurangi dampak kemiskinan serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama dalam situasi krisis ekonomi atau kondisi darurat yang mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidupnya.

Efektivitas suatu program kebijakan publik dapat dikaji dari sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks program BLT, efektivitas penyaluran bantuan sosial dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti ketepatan sasaran penerima bantuan, ketepatan waktu penyaluran, kejelasan mekanisme distribusi, serta tingkat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan.

Dalam pelaksanaan program BLT, mekanisme penyaluran bantuan umumnya dimulai dengan proses pendataan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat kelurahan atau desa. Pendataan tersebut biasanya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai basis data utama dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Setelah proses pendataan dilakukan, selanjutnya dilakukan tahap verifikasi dan validasi data untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria sebagai masyarakat miskin atau rentan miskin.

Tahap berikutnya adalah penetapan keluarga penerima manfaat yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil verifikasi data tersebut. Setelah daftar penerima bantuan ditetapkan, bantuan kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme yang telah ditentukan, seperti melalui pemerintah kelurahan atau melalui lembaga penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah. Dalam beberapa kasus, penyaluran bantuan juga dilakukan secara langsung kepada masyarakat melalui lembaga keuangan atau kantor pos.

Menurut (Dunn, 2012) dalam analisis kebijakan publik, efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan di lapangan. Implementasi kebijakan yang efektif akan mendorong tercapainya tujuan program secara optimal, sebaliknya implementasi yang kurang efektif akan

menghambat pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan program BLT tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat daerah.

Dalam praktiknya, efektivitas penyaluran BLT seringkali menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi keberhasilan program. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurang akuratnya data masyarakat miskin yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan. Dalam beberapa kasus, terdapat masyarakat yang sebenarnya tidak termasuk kategori miskin tetapi terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah keterlambatan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan dalam proses administrasi, keterbatasan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kendala teknis dalam proses distribusi bantuan. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas program karena bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat pada waktu tertentu menjadi tertunda.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pendataan dan penetapan penerima bantuan juga dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan program BLT. Ketika masyarakat tidak memahami mekanisme penentuan penerima bantuan, maka hal tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap program pemerintah dan memicu munculnya kecemburuan sosial di masyarakat.

### **Hambatan Implementasi Program BLT di Tingkat Kelurahan**

Implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tingkat kelurahan tidak terlepas dari berbagai kendala dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan hasil observasi di Kelurahan Menteng, salah satu hambatan utama terletak pada ketidaksesuaian data penerima bantuan. Sistem penentuan penerima bantuan saat ini menggunakan basis data desil yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui aplikasi yang telah disediakan pemerintah sejak tahun 2025. Dalam sistem tersebut, masyarakat yang berada pada desil 1 sampai 5 dikategorikan sebagai kelompok yang berhak menerima bantuan sosial. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya masyarakat yang memasukkan data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, seperti memalsukan foto rumah atau memberikan informasi yang tidak akurat dalam sistem pengajuan bantuan. Kondisi ini menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.

Hambatan lain yang muncul adalah tingginya tuntutan masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan, tetapi tidak tercantum dalam daftar penerima. Situasi ini sering menimbulkan protes dari masyarakat yang datang langsung ke kantor kelurahan untuk meminta bantuan. Padahal, kelurahan hanya berperan sebagai operator atau pelaksana teknis yang menyalurkan data dari pemerintah pusat. Dalam beberapa kasus, pihak kelurahan bahkan mengambil kebijakan dengan menggunakan dana pribadi untuk membeli sembako bagi masyarakat yang tidak masuk sebagai daftar penerima manfaat guna meredam konflik di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sosial di tingkat lokal sering menghadapi tekanan sosial dari masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Selain itu, hambatan juga terjadi pada ketidaksesuaian aturan dengan kondisi lapangan. Secara regulasi, satu keluarga hanya diperbolehkan menerima satu jenis bantuan sosial. Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa keluarga yang menerima lebih dari satu bantuan. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan sumber bantuan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah daerah, sehingga koordinasi data penerima menjadi kurang optimal. Akibatnya, distribusi bantuan belum sepenuhnya merata dan masih terdapat potensi ketimpangan dalam penerimaan bantuan di masyarakat.

### **Persepsi dan Respon Masyarakat Penerima Manfaat**

Secara umum, masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Menteng memberikan respon yang positif terhadap program BLT. Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang maupun sembako dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Bantuan tunai yang dicairkan melalui rekening bank serta bantuan sembako yang disalurkan melalui kelurahan atau kantor pos memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses bantuan sosial dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa program BLT memiliki peran penting dalam membantu menjaga daya beli masyarakat.

Namun demikian, terdapat pula perbedaan persepsi masyarakat terhadap bentuk bantuan yang diberikan. Sebagian masyarakat pada awalnya terbiasa menerima bantuan dalam bentuk uang tunai, sehingga ketika bantuan diberikan dalam bentuk sembako, muncul perbedaan pandangan dan sedikit kontradiksi di kalangan penerima bantuan. Meskipun demikian, masyarakat tetap merasa terbantu dengan adanya program bantuan tersebut karena dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga.

Dari sudut pandang pihak kelurahan, program BLT memang memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi jika diberikan secara terus-menerus maka berpotensi menimbulkan keterikatan masyarakat pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, pihak kelurahan menyarankan agar ke depan

program bantuan sosial tidak hanya berbentuk bantuan konsumsi, tetapi juga bisa dengan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kerja atau penyediaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

## **Evaluasi dan Implikasi Pelaksanaan Program BLT**

### **1. Evaluasi Pelaksanaan Program BLT**

Evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi program bertujuan untuk menilai sejauh mana program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaan program. Menurut (Dunn, 2012) evaluasi kebijakan merupakan proses yang digunakan untuk menilai kinerja suatu kebijakan publik serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan kebijakan di masa yang akan datang.

Evaluasi program BLT dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti monitoring pelaksanaan program oleh pemerintah daerah, pengawasan oleh aparat kelurahan, serta partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan program. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala, pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap sistem pendataan masyarakat, meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan, serta memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas mekanisme penyaluran BLT di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dapat dianalisis melalui berbagai aspek, seperti ketepatan sasaran penerima bantuan, ketepatan waktu penyaluran bantuan, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap program yang telah dilaksanakan. Analisis terhadap aspek-aspek tersebut dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana program BLT telah berjalan secara efektif dalam membantu masyarakat penerima manfaat.

### **2. Implikasi Pelaksanaan Program BLT**

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak hanya memiliki tujuan untuk memberikan bantuan finansial kepada masyarakat miskin, tetapi juga memiliki berbagai implikasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Implikasi tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana program tersebut dilaksanakan serta bagaimana masyarakat memanfaatkan bantuan yang diterima.

Salah satu implikasi positif dari pelaksanaan program BLT adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar

mereka. Bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Hal ini sangat penting terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah dan rentan terhadap tekanan ekonomi.

Menurut (Torado & Smith, 2011) program bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan pembangunan yang berorientasi dalam mengurangi tingkat angka kemiskinan serta meningkatkan hidup masyarakat yang layak. Bantuan sosial yang diberikan secara langsung kepada masyarakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mampu menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, terutama pada saat terjadi penurunan pendapatan akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Selain memberikan manfaat ekonomi, program BLT juga memiliki implikasi terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam beberapa kasus, program bantuan sosial dapat memperkuat hubungan sosial di masyarakat karena adanya rasa kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Program ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah apabila bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dilaksanakan secara transparan.

Namun demikian, pelaksanaan program BLT juga memiliki beberapa implikasi yang perlu menjadi perhatian. Salah satu implikasi yang sering muncul adalah munculnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Ketika bantuan diberikan secara terus-menerus tanpa disertai dengan program pemberdayaan masyarakat, maka terdapat kemungkinan bahwa masyarakat akan menjadi kurang termotivasi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Selain itu, program BLT juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat apabila proses penentuan penerima bantuan tidak dilakukan secara transparan dan adil. Masyarakat yang tidak menerima bantuan seringkali merasa diperlakukan tidak adil apabila mereka menilai bahwa terdapat penerima bantuan yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai masyarakat miskin. Kondisi ini dapat memicu konflik sosial di masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Implikasi lain dari pelaksanaan program BLT adalah bahwa bantuan yang diberikan umumnya bersifat jangka pendek dan belum mampu memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan kemiskinan. Bantuan tunai memang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak secara langsung meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, pelaksanaan program BLT perlu diintegrasikan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya, seperti pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, serta program pengembangan

ekonomi masyarakat. Dengan adanya program pemberdayaan tersebut, masyarakat tidak hanya menerima bantuan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka secara mandiri.

Dalam konteks penelitian ini, implikasi pelaksanaan program BLT di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti perubahan kondisi ekonomi masyarakat penerima manfaat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap program bantuan, serta dampak sosial yang muncul dalam masyarakat akibat pelaksanaan program tersebut. Analisis terhadap implikasi tersebut dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana program BLT telah memberikan manfaat bagi masyarakat serta berbagai tantangan yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program di masa yang akan datang.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya secara umum sudah efektif dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Efektivitas tersebut terlihat dari penggunaan sistem pendataan berbasis desil dan data nasional, keterlibatan RT dalam proses verifikasi dan validasi data, serta mekanisme penyaluran bantuan yang dilakukan secara bertahap sehingga mempermudah distribusi kepada penerima manfaat.

Dalam perspektif syariah, pelaksanaan BLT telah mencerminkan upaya mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi, ketidaktepatan distribusi dan lemahnya validasi data menunjukkan belum optimalnya penerapan nilai **keadilan** ('**adl**) dan **amanah** dalam pengelolaan bantuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem verifikasi, transparansi, serta integrasi program bantuan dengan pemberdayaan ekonomi agar tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong kemandirian masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidaksesuaian data antara sistem dengan kondisi di lapangan yang berpotensi menimbulkan penyaluran yang tidak tepat sasaran, serta koordinasi data antarprogram bantuan social yang belum sepenuhnya terintegrasi. Selain itu, tuntutan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan juga menjadi tantangan dalam implementasi program di tingkat kelurahan.

Meskipun demikian, program BLT memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi dan validasi data, peningkatan koordinasi antar instansi, serta integrasi program bantuan social dengan

program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Amelia, & Fitrianto. (2025). *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Transparansi Penyaluran Dana Sosial dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia. c.*
- Awalia & Sumayya. (2024). Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai dalam Mengurangi Kemiskinan di Pedesaan. (*JEKP*) *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 11(2)156–175.
- Bawadi, Z., & Ratnasari, P. (2023). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 9(1), 71-82.
- BPS. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. *bps.go.id*. (<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>).
- Darlis, I., Alkhairi, F. R., Nielwaty, E., & Kuning. (2025). *PERAN APLIKASI CEK BANSOS DALAM PENYALURAN*. 153–165.
- Dewi, Martanti, & Middia. (2022). *The Effectiveness of Targeting Food Assistance Program in Indonesia*. 10(April), 37–71.
- Djako, P., Panigoro, M., & Sudirman, S. (2022). Pengaruh Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. *Jambura Economic Education Journal*, 4(2), 196-207.
- Dunn, W. N. (2012). *Public policy analysis: An introduction* (5th ed.). Boston: Pearson.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Boston: Pearson.
- Gladieu, S. (2018). *The State of Social Safety Nets 2018*. *www.worldbank.org*. (<https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotectionandjobs/publication/the-state-of-social-safety-nets-2018>).
- Hastuti, S., Pramana, R. P., Sadaly, H., et al. (2020). *Social Assistance and Social Protection during the COVID-19 Pandemic in Indonesia*. Jakarta
- Husni, A. et al. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Pemberian Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi COVID-19 (Studi di Desa Air Asuk

- Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 282–304.
- Kementrian, I. R. S. (2022). *DTKS BARU: Basis Data Tunggal Program Perlindungan Sosial*.
- Kusumawati, A. S. & Kudo, Toshihiro (2019). The Effectiveness of Targeting Social Transfer Programs in Indonesia The Effectiveness of Targeting Social Transfer Programs in Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 3(3), 282-297.
- Miles & Hubermas. (1994). *Qualitative Data Analysis* (2nd ed.) New York: Penerbit Sage.
- Nunung, A., Latifah., Fatmawati., Sulastri, L. (2025). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial untuk Menginvestigasi Ketidaktepat Sasaran Bantuan Sosial di Desa Rancaekek Kulon Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik (JAKP)*, 10(1), 62–82.
- Pahrudin, Z. S., Fitri, A. N., Gusti, S. A. R., Fadilla, A. (2024). Pemerataan Ekonomi melalui Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia. *Journal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, 1(1), 1-8.
- Parwati, P. Y., Afriala. f., Anas, A. (2026). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. *Journal of Public Service, Public Police, and Administration*, 5(1), 60-68.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Setiawan, I., & Jamaliah. (2023). Analisis Kebijakan Publik dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *ETNIK: Jurnal Ekonomi - Teknik*, 2(5), 399-405.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, R.M. (1975). Problems in the measurement of organizational effectiveness. *Administrative Science Quarterly*, 20(4), 546-558.
- Sulaksono, Bambang, Mawardi, & Sulton. (2012). *Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Raskin dalam Mencapai Enam Tepat*.
- Torado & Smith., Putra, D. B. (alih bahasa). (2011). *Economic Development/Pembangunan Ekonomi* (11 jilid, bahasa Indonesia ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wafik, A. Z. & Putra I. K. (2023). Mengukur Dampak Program Bantuan Langsung Tunai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 251–257.